

MASYARAKAT MADANI DALAM PERSPEKTIF AL- QUR'AN

Nurdinah Muhammad

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Darussalam-Banda Aceh

Email: nurdinahupa@yahoo.com

Civil society can not be separated from the history of Islamic civilization and also western civilization. From historical reviews it must be admitted that western societies are far more serious than Islamic societies, in increasing public domination of the state. When the western society has succeeded in abolishing the dominance of religion, monarchy and capital, the new Islamic society has escaped colonial domination. So it can not be denied that finally the nations of Islam should adopt many western thinking. The problem of civil society application in Islamic nations will surely be faced with the problem of government intervention which is badly needed on the unstable structure of society. Therefore, sometimes between civil society and government intervention often generate ambiguity for state officials. Therefore, alternative models of government intervention that will not dominate the society will be required, but on the contrary it will enable civil society to be characterized by the characteristics of, free public sphere, democracy, tolerance, pluralism and social justice.

ABSTRAK

Masyarakat madani tidak dapat dipisahkan dari sejarah peradaban Islam dan juga peradaban barat. Dari tinjauan historis harus diakui bahwa masyarakat barat jauh lebih serius dibandingkan masyarakat Islam, dalam meningkatkan dominasi masyarakat terhadap negara. Ketika masyarakat barat sudah berhasil menghapuskan dominasi agama, monarkhi dan kapital, masyarakat Islam baru lolos dominasi kolonial. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa akhirnya bangsa-bangsa Islam harus banyak mengadopsi pemikiran barat. Permasalahan aplikasi masyarakat sipil di bangsa-bangsa Islam, pasti akan berhadapan dengan problem intervensi pemerintah yang nota bene sangat dibutuhkan pada struktur masyarakat yang masih labil. Oleh karena itu, kadang antara masyarakat madani dan intervensi pemerintah sering menimbulkan ambiguitas bagi penyelenggara negara. Oleh karenanya diperlukan model-model alternatif intervensi pemerintah yang tidak akan mendominasi masyarakat, namun sebaliknya akan dapat mewujudkan masyarakat madani ditandai dengan karakteristik diantaranya, wilayah publik yang bebas (*free public sphere*), demokrasi, toleransi, kemajemukan (*pluralism*) dan keadilan sosial.

Kata Kunci: *Masyarakat Madani, Al-Qur'an*

A. Pendahuluan

Persoalan masyarakat madani akhir-akhir ini semakin banyak di perbincangkan dikaji maupun didiskusikan. Beragam pendapat dan komentar

muncul dari berbagai kalangan baik para sosiolog, antropolog, cendekiawan Islam, sejarawan dan agamawan. Pada intinya mereka menyebut masyarakat madani konsep lama yang kembali diaktualkan.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Nurkholish Madjid yang dikutip oleh Adi Suryadi bahwa konsep masyarakat madani adalah konsep lama bukan sesuatu yang baru, suatu gagasan yang Islami, merupakan cita-cita Islam. Bahkan sebagai fakta empiris yang tak terbantah dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad saw berhasil membentuk masyarakat berperadaban tinggi di kota Madinah.¹

Sekalipun dipandang sebagai konsep lama bukan berarti sesuatu yang usang tanpa arti atau makna. Tetapi suatu bentuk masyarakat yang ideal sejalan dengan tuntutan zaman, kondisi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tatanan ini aspek keterbukaan kebersamaan, demokratisasi dan keadilan benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini untuk merealisasikan hal tersebut di sini peran umat Islam sebagai kelompok mayoritas sangat strategis menjadi faktor penentu, pengendali, pemberi nilai sekaligus pemberi arah terutama dengan munculnya era reformasi yang sedang bergulir saat ini.

B. Pengertian Masyarakat Madani

Wacana tentang Masyarakat Madani di Indonesia memiliki banyak kesamaan istilah dan penyebutan, namun memiliki karakter dan peran yang berbeda satu dari yang lainnya. Dengan merujuk sejarah perkembangan masyarakat sipil (*Civil Society*) di Barat, sejumlah ahli di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda dalam maksud serupa. Dalam hal ini menurut Sahrul; di kalangan para ahli masih terdapat ketidaksamaan pendapat tentang pengertian masyarakat madani. Ada yang menyebut bahwa masyarakat madani tidak sama dengan istilah *civil society* bila ditinjau dari segi karakteristiknya. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa masyarakat madani justru itulah yang di sebut *civil society* atau istilah masyarakat madani suatu istilah yang di Indonesiakan.²

Jika merujuk kepada pemaknaan istilah maka masyarakat madani berasal dari kata madani pada sebuah kota yang dulunya di sebut Yastrib.³ Kota petani dan industri kecil.⁴ Akrim Dhiyauddin Umari menyebutkan Yastrib nama lama dari Madinah Al-Munawarrah, sumber kemenangan dengan tanah yang subur dan air yang melimpah.⁵ Di Negara Madinah tersebut masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw yang telah berhasil membentuk masyarakat berperadaban tinggi.

Menurut Nurkholish Madjid, kata Madinah berasal dari bahasa Arab “*madaniyah*” berarti peradaban tinggi, karena itu masyarakat madani adalah

¹. Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani*, (Jakarta : Raja Wali Press, 1999), 192.

².Sahrul, *Sosiologi Islam*,Cet.1, (Medan, IAIN PRESS, 2011), 129.

³.Ali Suryadi Culla, *Masyarakat*, 192.

⁴.Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung : Mizan, 1995), 100.

⁵.Akrim Dhiyauddin Umar, *Madinah Society at The Time of The Prophet: Its Characteristic and Organization*, Terjemahan, Mun'im A. Sirry, *Masyarakat Madani : Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, (Jakarta : Gema Insani Press,1999),63.

masyarakat yang beradab. Makna lain dari kata madani berarti kota, dengan demikian masyarakat madani adalah masyarakat kota.⁶

Perkataan “Madinah”, dalam peristilahan modern, menunjuk kepada semangat dan pengertian “civil society” suatu istilah Inggris yang berarti “masyarakat sopan, beradab, dan teratur” dalam bentuk negara yang baik. Dalam arti inilah harus difahami kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, (*al-insan-u madniy-un bi al-tab’-i*) (“manusia menurut naturnya adalah bermasyarakat budaya” (merupakan padanan adagium terkenal Yunani bahwa manusia adalah “*zoon politicon*”).⁷

Dalam perspektif Islam, civil society lebih mengacu kepada penciptaan peradaban. Kata al-din, yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan dengan makna *al-tamaddun*, atau peradaban. Keduanya menyatu dalam pengertian al-madinah yang arti harfiahnya adalah kota. Dengan demikian, maka civil society diterjemahkan sebagai masyarakat madani yang mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban, dan perkotaan. Di sini agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya.

Senada dengan Nurkholish Majid, cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan bahwa dalam kerangka menciptakan kehidupan yang berkualitas dan berkeadaban, masyarakat madani menghajatkan sikap-sikap toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima beragam perbedaan pandangan politik di kalangan warga negara.⁸

Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasyarat lain bagi masyarakat madani. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

Menurut Nurkholish Madjid, pluralisme adalah pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan menurutnya pula, pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain. Sesuai dengan pernyataan di atas Al-Quran mengisyaratkan bahwa pluralitas (kemajemukan) merupakan desain Tuhan. Dalam surat Al- Hujurat ayat 13 dinyatakan,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya ;Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

⁶.Nurkholis Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, Dalam Jurnal Kebudayaan dan Peradapan, Ulumul Qur’an, No.2/1996,51-55.

⁷. Dawam Raharjo, dkk, *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Cet, 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), 80.

⁸.Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani*, Cet.Ke-1,(Bandung: PT.Remaja Karya,1999),34.

Gambaran di atas menjelaskan pengertian pluralisme sebagai ajaran yang menekankan keanekaragaman manusia dalam berbagai aspek kehidupan pada umumnya. Namun dalam pembahasan selanjutnya pluralisme lebih diarahkan pada realitas beragama yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini terlebih dahulu perlu dilihat kembali sejarah peradaban lama yang menunjukkan adanya akulturasi budaya dengan agama yang membawa perkembangan agama dalam masyarakat, yang lahir dari sebuah proses panjang peradaban agama.

Sejalan ide-ide diatas, dapat dipahami menurut Azyumardi Azra, masyarakat madani lebih dari sekedar gerakan pro-demokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan bertamadun. Sejalan dengan pandangan diatas, dapat dimengerti juga, Nurkholis Madjid menegaskan kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Menurut Madjid, pluralisme adalah pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan menurutnya pula, pluralisme merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan. Kemajemukan menurutnya erat kaitannya dengan sikap penuh pengertian dan toleransi kepada orang lain, yang nyata-nyata diperlukan dalam masyarakat yang majemuk. Secara teologis, tegas beliau, kemajemukan sosial merupakan dekrit Allah untuk umat manusia.⁹

Lebih luas Ridwan Lubis berpendapat, bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang telah memiliki kemandirian menuju kepada kemajuan guna memperoleh kesejahteraan dirinya dalam lingkungannya. Seluruh potensi masyarakat bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri tetapi juga dapat memberikan limpahan mamfaat dan memberikan kontribusi pada masyarakat di luar dirinya.¹⁰

Sedangkan Aswab Mahasin dalam kata pengantar buku *Membangun Masyarakat Sipil* mengatakan madani adalah masyarakat kota pada umumnya telah tersentuh oleh peradaban maju. Kata sipil memang berasal dari bahasa latin *civitas dei* atau kota ilahi. Dari kata ini pula dikenal istilah *civilization* yang berarti peradaban.¹¹

Dawam Rahardjo mengatakan, pertama sekali istilah Masyarakat Madani dimunculkan oleh Anwar Ibrahim, mantan wakil perdana menteri Malaysia. Dawam mengutip pendapat beliau bahwa Masyarakat Madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu. Anwar Ibrahim menjelaskan, Masyarakat Madani mempunyai ciri-ciri yang khas:

⁹.A.Ubaedillah,dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006),316.

¹⁰.M. Ridwan Lubis, *Aktualisasi Nilai-nilai Keislaman Terhadap Pembangunan Masyarakat*, (Medan: Media Persada,2000),50.

¹¹. Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan*, (Bandung: Mizan, 1995), 18

kemajemukan budaya (multicultural), hubungan timbal balik (*reprocity*), dan sikap saling memahami dan menghargai.

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa karakter Masyarakat Madani ini merupakan "guiding ideas", dalam melaksanakan ide-ide yang mendasari masyarakat madani, yaitu perinsip moral, keadilan, keseksamaan, musyawarah dan demokrasi. Sejalan dengan gagasan Anwar Ibrahim, Dawam Rahardjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Menurutnya dalam masyarakat madani, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non – negara. Selanjutnya Dawam menjelaskan, dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan.¹²

Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah surat Hud, ayat 118 – 119.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَوَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِأَمَلَانِ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩)

Artinya : Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.

Dari beberapa penjelasan di atas, bahwa masyarakat madani adalah masyarakat berbudaya, ber peradaban tinggi, masyarakat kota yang modern dan masyarakat berbudi luhur, demokratis, di mana para anggotanya menyadari hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan - kepentingan bersama, secara filosofis mengacu kepada masyarakat yang sempurna yang dilandasi dengan ajaran Islam.

C. Islam dan Peluralisme Menuju Masyarakat Madani

Setiap agama membawa misi sebagai pembawa kedamaian dan keselarasan hidup bukan hanya antar manusia, tetapi juga antar sesama makhluk Tuhan. Di dalam terminologi Al-Quran, misi suci itu disebut *rahmah lil al-'alamin* (rahmat dan kedamaian bagi semesta). Di dalam al-Qur'an, surat. 2 : 148 berbunyi:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

¹².Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Cet.Ke.1,(Jakarta: LP3ES, 1999), 302- 304.

Ayat tersebut di atas mengakui masyarakat terdiri atas berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan sendiri-sendiri. Manusia harus menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Justru bila setiap muslim memahami secara mendalam etika pluralisme yang terdapat dalam al-Qur'an, tidak perlu lagi ada ketegangan, permusuhan, dan konflik dengan agama-agama lain, selama mereka tidak saling memaksakan.

Munir Mulkan mengatakan sebagai ideologi dan politik, pluralisme pernah diteladankan oleh Rasulullah Saw kepada Umar dan diteruskan kepada para khalifah. Bukti-bukti empiris pluralisme Islam terjadi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik yang kongkrit di Andalusia, Spanyol, pada masa pemerintahan Khalifah Umayyad. Sejarah mencatat bahwa kedatangan Islam di Spanyol telah mengakhiri politik monoreligi secara paksa oleh penguasa sebelumnya. Pemerintahan Islam yang kemudian berkuasa selama 500 tahun telah menciptakan masyarakat Spanyol yang pluralistik, sebab para pemeluk tiga agama- Islam, Kristen, dan Yahudi dapat hidup saling berdampingan dan rukun. Mereka menghargai eksistensi kebudayaan lain di luar Islam, seperti Kristen dan Yahudi.¹³

Ada beberapa ciri masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad Saw di kota Madinah, yaitu :

1. Egalitarian, yaitu persamaan hak di tengah-tengah masyarakat. Mungkin inilah salah satu faktor pendorong mengapa para hamba sahaya, kelompok terpinggirkan, kelas menengah dan bangsawan secara ikhlas berbondong-bondong masuk agama Islam.
2. Penghargaan terhadap orang yang berprestasi bukan berdasarkan kesukuan, golongan dan kebangsaan.
3. Keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat. Pada masa Rasul Saw diberi kebebasan demikian pula partisipasi aktif masyarakat dalam membangun negara Madinah.
4. Penegakan hukum dan keadilan. Rasul Saw dalam hal ini cukup tegas bahkan ia bersabda “ andai kata Fatimah putriku mencuri akan saya potong tangannya. Maksudnya, siapa saja yang bersalah termasuk anak Rasul akan ditetapkan hukuman dan keadilan.
5. Toleransi dan pluralisme, semangat tolong menolong benar-benar ditegakkan Rasul Saw, demikian pula semangat pluralis (keaneka ragaman), agama, suku, golongan dan lainnya sangat dihormati dan dijunjung tinggi.
6. Musyawarah, dalam setiap mengambil keputusan politik Rasul Saw selalu menerapkan prinsip-prinsip musyawarah, yaitu kebersamaan dan kesepakatan. Prinsip yang ditegakkan Rasul Saw menunjukkan bahwa ia bukanlah pemimpin otoriter.¹⁴

Ketika Rasulullah Saw berada di Madinah. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad Saw bukanlah upaya melegitimasi agama resmi negara saat itu, dan bukan pula alat pemaksa agar orang-orang memeluk Islam seluruhnya. Dengan mengikuti prinsip universal keadilan Ilahi saja, kita ketahui bersama bahwa

¹³. A. Munir Mulkan, *Atas Nama Agama- Agama*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), 65.

¹⁴. Adi Suryadi Culla, *Masyarakat, ...*, 193-194.

perbedaan latar belakang pendidikan, lingkungan sosial budaya, dan kesempatan seseorang, meniscayakan diferensiasi penerimaan konsep tentang Tuhan dan Agama. Dan selama memerintah di Madinah, Rasulullah Saw tidak pernah memaksakan masyarakat non Muslim untuk mengikuti agama penguasa. Bahkan, melalui perjanjian di antara semua penduduk Madinah ditetapkan dasar-dasar toleransi demi terwujudnya perdamaian dan kerukunan. Salah satu isi perjanjian dengan kaum Yahudi menyebutkan : Orang Yahudi yang turut dalam perjanjian dengan kami berhak memperoleh pertolongan dan perlindungan; tidak akan diperlakukan zalim. Agama Yahudi bagi orang-orang Yahudi dan agama Islam bagi orang-orang Islam. Jika ada di antara mereka berbuat zalim, itu hanya akan mencelakakan dirinya dan keluarganya.¹⁵

Pernyataan di atas sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat 109 : 6 berbunyi :

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya : Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.

Dengan demikian, agama yang digunakan Rasulullah Saw sebagai sumber utama kekuatan moral. Perilaku yang murni religius lebih diinginkan dari pada formalisasi agama.

Melihat fakta historis tersebut, Dadang Kahmad mengutip pendapat Nurcholish Madjid bahwa sistem nilai pluralisme adalah sebuah aturan Tuhan (sunnatullah) yang tidak mungkin berubah, diubah, dilawan dan diingkari. Barang siapa yang mencoba mengingkari hukum kemajemukan budaya, maka akan timbul fenomena pergolakan yang tidak berkesudahan. Boleh dikatakan bahwa memahami pluralitas agama dan budaya merupakan bagian dari memahami agama. Sebab, memahami agama pada dasarnya juga memahami kebudayaan masyarakat secara menyeluruh. Dan, jika agama dipahami secara integral dengan kondisi sosial kulturalnya, pada saat itu pula akan tampak dengan sendirinya mana aspek budaya yang selaras dengan misi agama dan mana yang tidak.¹⁶

Syakiman menjelaskan konsep masyarakat madani yang dikaitkan dengan Islam adalah yang bermakna peradaban, masyarakat tersebut mengacu pada struktur masyarakat yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad Saw ketika menata masyarakat Madinah.¹⁷

Bila dicermati lebih lanjut format penataan masyarakat Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, dengan data otentik yang dapat dijadikan rujukan adalah sebuah undang-undang yang disusun Rasulullah berdasarkan kesepakatan seluruh penduduk Madinah dan sekitarnya yang terekam secara eksplisit dalam sebuah konstitusi yang dikenal dengan piagam Madinah. Piagam ini disepakati sejak awal peristiwa hijrah Nabi ke Madinah dan diformulasikan sebagai undang-undang sebelum terjadinya peristiwa perang Badar (2 H / 624 M). Teks asli dari

¹⁵.Hamid Al-Husaeni, *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad Saw*, (Jakarta : Yayasan al- Hamidy, 1992), 477.

¹⁶. Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Cet. Ke 2, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002), 174.

¹⁷. Syakiman M. Noer, *Indonesia Baru Menuju Masyarakat Madani*, (Padang : Baitul Hikmah, 2000), V.

piagam itu dapat ditemui secara lengkap dalam sirah Rasul Allah yang ditulis oleh Ibn Ishaq (W. 150 / 767 di Baghdad).¹⁸

Gambaran di atas dapat dipahami bahwa, masyarakat madani yang dicita-citakan Islam berdasarkan pada keinginan untuk mewujudkan masyarakat yang berperadaban, bermartabat, sopan, aman, tertib, taat hukum, cinta damai. Secara filosofis mengacu kepada masyarakat yang sempurna sesuai dengan yang tercantum dalam bingkai nilai-nilai Islam yang kuat. Madani yang dimaksudkan Islam adalah model masyarakat ideal sebagai mana yang dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad Saw.

Gagasan agama madani diilhami oleh konsepsi *civil religion* yang untuk pertama kalinya dipopulerkan oleh Robert N. Bellah, menurutnya gagasan *civil religion* untuk pertama kali diintrodusir oleh J. Rousseau membuat garis besar tentang dogma-dogma *civil religion* yang sederhana yaitu eksistensi Tuhan, kehidupan yang akan datang, pahala bagi kebajikan dan hukuman bagi yang sebaliknya, serta penyingkiran sikap keagamaan yang tidak toleran. Lebih lanjut Bellah mengemukakan bahwa ide tentang *civil religion* bukan hanya milik Rousseau, tetapi telah menjadi bagian dari iklim budaya akhir abad ke- 18. Bellah misalnya, mengutip Benjamin Franklin yang menulis dalam otobiografinya bahwa eksistensi Tuhan yang menciptakan dunia dan mengatur dengan kebijaksanaan-Nya adalah tidak diragukan lagi. Demikian pula, bahwa pelayanan yang disukai oleh Tuhan adalah berbuat baik kepada manusia; jiwa bersifat abadi; semua kejahatan akan memperoleh hukuman dan kebajikan akan memperoleh pahala, baik di dunia atau di akhirat, merupakan esensi setiap agama. Dengan dasar inilah Bellah memberikan hipotesis akan adanya alasan yang kuat untuk mempercayai bahwa agama, khususnya ide tentang Tuhan, memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk alam pikiran para negarawan.¹⁹

Dadang Kahmad mengatakan konsep agama madani mengandaikan ada lima substansi isi keagamaan yang bersifat universal, yaitu adanya orientasi hidup transendental yang meletakkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi; ikatan batin pada nilai-nilai kemanusiaan; kesadaran akan tanggung jawab bersama; pandangan yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri pribadi; kebebasan dan toleransi bersama.²⁰

Dalam konteks pluralitas agama, orientasi transendental dengan meletakkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi sehingga segala bentuk absolutisme politik atau agama tertentu, sekalipun mayoritas, tidak dapat diterima. Semua agama harus tunduk pada konsepsi ketuhanan universal, dan dalam konsepsi ketuhanan ini pula, agama mendapatkan titik temu, tanpa harus meleburkan dalam satu agama. Konsep masyarakat madani seyogyanya dapat melahirkan suatu ikatan batin bersama dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran akan tanggung jawab dan lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selain itu, dapat melahirkan suatu sikap toleran dalam beragama dan kebebasan dalam mengekspresikan keyakinan (agama), dengan tidak mengganggu keutuhan lingkungan dan kemanusiaan pemeluk agama lain. Dengan demikian, melalui agama madani kelompok agama akan dapat disatukan

¹⁸. Syakiman M. Noer, Indonesia Baru ... , vii.

¹⁹. Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama Potret Agama dalam Dinamika Konflik, Pluralisme dan Modernitas*, (Bandung : Pustaka Setia , 2011),186-187.

²⁰. Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama. (Potret Agama . . . , 189.*

secara politis, sekaligus dipertahankan kebhinnekaannya, baik secara kultural maupun keagamaan. Demikian pula, konflik-konflik keagamaan akan sedapat mungkin diarahkan untuk proses dinamisasi universal yang menjadi titik temu dan kesepakatan bersama.²¹

Konsekuensi lain yang juga sangat signifikan dari kesadaran Ketuhanan Yang Maha Esa, pada kehidupan tingkat sosial adalah munculnya pola-pola hidup dalam standar perilaku moral yang tinggi berupa “tindakan-tindakan bermoral“. Dalam semangat ketuhanan, hidup bermoral bukan lagi merupakan masalah kesediaan, melainkan sebuah keharusan, dan kelanjutan yang wajar dari fitrah kemanusiaan yang berketuhanan. Oleh karena itu, dalam perspektif ini, gagasan agama madani lebih merupakan aktualisasi nilai-nilai universal social ethic dalam setiap tindakan kekayaan dan berkebudayaan. Hal yang niscaya bahwa iman atau kesadaran ketuhanan akan selalu berdialog dengan realitas sosial yang plural karena hidup manusia tidak berlangsung dalam “suasana batin“ yang tertutup, tetapi dalam proses dialog dengan lingkungannya. Dengan kata lain, manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari dialog dalam dialektika dinamika lingkungan dunia atau kebudayaan.²²

Kutipan di atas dapat dipahami, bahwa dalam kerangka membangun kebudayaan yang sejalan dengan keimanan dan konsepsi ketuhanan, kerja sama inter dan antarumat beriman (beragama) dalam dialog kehidupan (menyelesaikan berbagai problem kemanusiaan), menjadi suatu keharusan. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui berbagai forum komunikasi atau perhimpunan agama yang memiliki kepedulian iman bersama dalam menjaga keutuhan lingkungan dan kemanusiaan. Dalam konteks inilah, agama madani sebagai universal social ethic seperti keadilan sosial, perdamaian dan pembebasan, dapat dijadikan dasar pijakan bagi kerja sama inter dan antarumat beragama. Melalui pijakan universal social ethic, seluruh kaum beriman (penganut agama), secara universal menemui tantangan kemanusiaan yang sama sehingga dapat tersentuh “religiusitasnya“, untuk tidak hanya menonjolkan *having a religion*, tetapi juga *being a religion* sebagai suatu *promising and challenging*. Dengan demikian, kerja sama antarumat beriman seyogyanyalah dapat diikat dan diarahkan dalam gerakan bersama untuk mewujudkan keadilan sosial, perdamaian, dan pembebasan. Gerakan bersama ini pula, yang tampaknya akan menjadi tugas kemanusiaan yang berdimensi perennial.

Perangkat yang dibutuhkan dalam membangun masyarakat madani menuju pluralisme, adalah meliputi amal saleh (perbuatan), keterbukaan berpendapat, kebersamaan, dan benar-benar adil dalam bertindak, demokratis berdasarkan prinsip musyawarah. Dalam proses musyawarah akan melahirkan hubungan sosial yang harmonis yang diilhami oleh semangat kebersamaan, saling membantu maupun mengakui keaneka ragaman baik berkaitan dengan perbedaan suku, bangsa, agama dan lainnya. Bagi masyarakat modern mengakui keaneka ragaman merupakan modal utama dalam membangun masyarakat madani dan merupakan tuntunan mendasar dalam membangun masyarakat madani yang didalannya dihiasi dengan nilai-nilai Islam.

²¹. Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Potret Agama . . . , 190.

²². P. Leenhouders, *Manusia dalam Lingkungan*, *Refleksi Filsafat tentang Manusia*, Terj.K.J. Veeger M. A., (Jakarta : Gramedia,1988), 79 – 81.

D. Kesimpulan

Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia menghajatkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani adalah: wilayah publik yang bebas (*free public sphere*), demokrasi, toleransi, kemajemukan (*pluralism*), dan keadilan sosial (*social justice*).

Dalam konteks al- Qur'an, tampaknya memang mendesain untuk bisa menata kehidupan sosial yang pluralistik. Sebagaimana bisa dilihat dalam perumusan dan pelaksanaan butir-butir Piagam Madinah, paradigma pluralisme ini merupakan sebuah terobosan yang luar biasa maknanya dalam mengarahkan sejarah kemanusiaan. Piagam Madinah hadir mempertahankan “ gagasan baru “ bagi suatu bentuk tatanan “ masyarakat baru “ yang disebut *ummat (community)* dalam sejarah ummat manusia. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya adalah prinsip universal yang diakui oleh kalangan internasional sebagai prasyarat untuk mewujudkan kehidupan sosial- politik yang egaliter dan demokratis.

Dalam sudut pandang Islam, masyarakat madani dapat dirumuskan secara sederhana. Rumusan tersebut yaitu membangun masyarakat yang adil, beretika, terbuka dan demokratis, dengan landasan takwa dengan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sahnya nilai-nilai hubungan sosial yang luhur. Bentuk-bentuk hubungan sosial tersebut yaitu toleransi dan pluralisme. Kedua-duanya merupakan wujud ikatan keadaban (*bond of civility*). Maka dari itu, toleransi dan pluralisme menjadi bagian untuk mewujudkan nilai-nilai keadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah,dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani*, Jakarta : Raja Wali Press, 1999.
- Akrim Dhiyauddin Umar, *Madinah Society at The Time of The Prophet: Its Characteristic and Organization*, Terjemahan, Mun'im A. Sirry, *Masyarakat Madani : Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, Jakarta : Gema Insani Press,1999.
- Azyumardi Azra,*Menuju Masyarakat Madani*, Cet.Ke-1,Bandung: PT.Remaja Karya,1999.
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama. (Potret Agama dalam Dinamika Konflik, Pluralisme dan Modernitas)* , Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011.
- Dadang Kahmad,*Sosiologi Agama*, Cet. Ke 2, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Dawam Raharjo, dkk, *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Cet, 1,Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Cet.Ke.1, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Ernest Gellner, *Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, 1995.
- Hamid Al-Husaeni, *Riwayat Kehidupan Nabi Besar Muhammad Saw*, Jakarta : Yayasan al- Hamidy, 1992.
- Harun Nasution, *Islam Rasional*, Bandung : Mizan, 1995.
- Ibrahim, F. W. (2012). PEMBENTUKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA MELALUI CIVIC EDUCATION. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 13(1).
- M. Ridwan Lubis, *Aktualisasi Nilai-nilai Keislaman Terhadap Pembangunan Masyarakat*, Medan: Media Persada,2000.
- Munir Mulkhan, *Atas Nama Agama- Agama*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.
- Nurkholis Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, Dalam Jurnal Kebudayaan dan Peradapan, Ulumul Qur'an, No.2/1996.
- P. Leenhouders, *Manusia dalam Lingkungan, Refleksi Filsafat tentang Manusia* , Terj.K.J. Veeger M.A., Jakarta : Gramedia, 1988.
- Sahrul, *Sosiologi Islam*,Cet.1, Medan, IAIN Press, 2011.
- Syakiman M. Noer, *Indonesia Baru Menuju Masyarakat Madani*, Padang : Baitul Hikmah, 2000.
- Wahid, A. (2015). PERAN SUNAH DALAM PENATAAN KEHIDUPAN UMAT BERPERADABAN. *Jurnal Nuansa*, 6(2).